

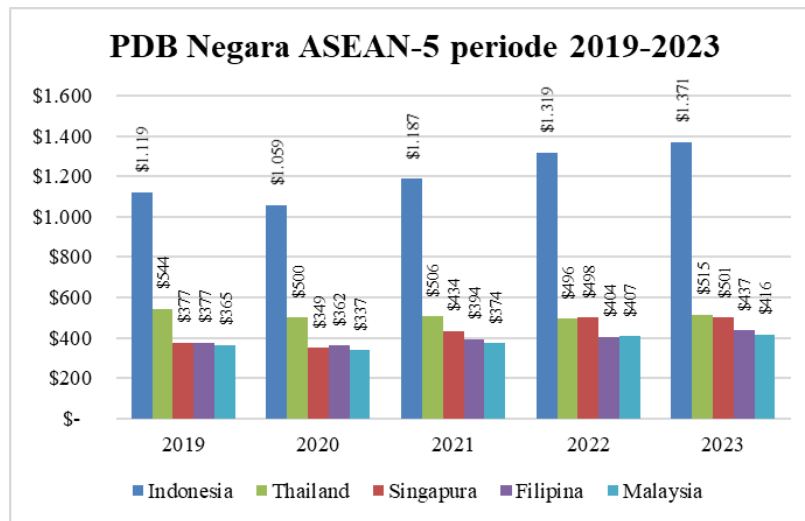
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) adalah organisasi yang beranggotakan sebelas negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. ASEAN didirikan oleh lima negara anggota, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Singapura yang disebut ASEAN-5 pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand (Annisa, 2023). ASEAN sendiri didirikan untuk memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Negara-negara ASEAN-5 masing-masing memiliki indeks saham utama yang merefleksikan performa pasar modalnya. Indeks saham ini termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang juga dikenal sebagai *Jakarta Composite Index* (JCI), yang merupakan indeks bursa saham Indonesia. *Kuala Lumpur Composite Index* (KLSEI) adalah indeks bursa saham Malaysia. *Straits Time Index* (STI) adalah indeks bursa saham Singapura, *Philippine Stock Exchange Index* (PSEI) adalah indeks bursa Filipina dan yang terakhir *Stock Exchange of Thailand Index* (SETI) merupakan indeks bursa saham Thailand (Irawati & Rutten, 2013).

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output yang memenuhi permintaan pelaku ekonomi, sangat penting untuk mengetahui besarnya angka PDB. Standar kehidupan antar negara juga dihitung dengan PDB (Warkawani et al., 2020). Produk Domestik Bruto (PDB) di negara-negara ASEAN diproyeksikan mencapai 3,67 triliun dolar AS pada tahun 2022 (O'Neill, 2024). Hal tersebut mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan akan terus bertumbuh pada tahun 2023 serta di masa mendatang. Berikut adalah grafik peningkatan PDB di negara ASEAN-5 periode 2019-2023.



Gambar 1.1 PDB Negara ASEAN-5 periode 2019-2023
(Sumber: www.imf.org , 2024)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan PDB negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia selama periode 2019-2023. Terlihat bahwa Indonesia mengalami kenaikan PDB secara konsisten setiap tahunnya. Beberapa negara seperti Thailand dan Filipina sempat mengalami penurunan pada awal pandemi, namun kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, negara seperti Malaysia dan Singapura menunjukkan grafik yang fluktuatif, namun secara keseluruhan tetap mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan PDB sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor perbankan yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dengan menyalurkan dana untuk tujuan investasi (Wiratnoko & Putra, 2023).

Meskipun pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif, hal tersebut juga membawa konsekuensi negatif, yaitu kerusakan lingkungan yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Perbankan, sebagai sektor yang tidak secara langsung memberikan efek negatif terhadap lingkungan, tetap memiliki andil melalui pendanaan dan pembiayaan kegiatan bisnis yang berpotensi merusak lingkungan. Misalnya, bank yang memberikan kredit kepada proyek-proyek di sektor industri ekstraktif, energi fosil, atau agribisnis yang tidak berkelanjutan, secara tidak langsung turut berkontribusi pada degradasi lingkungan dan peningkatan emisi karbon. Meski ASEAN saat ini menyumbang 7% dari emisi karbon global, Sri

Mulyani menilai kawasan ini memiliki potensi untuk mengatasi efek perubahan iklim secara efektif. Sri Mulyani menegaskan bahwa dengan keberagaman ekonomi di ASEAN, selalu terdapat peluang untuk menghadapi perubahan iklim. Namun, di sisi lain, tantangan tetap ada untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kapasitas dan pendanaan yang memadai guna mengatasi isu perubahan iklim (*Indonesia International Sustainability Forum, 2024*).

Pengungkapan emisi karbon adalah salah satu cara perusahaan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada hubungan dengan lingkungan dan masyarakat, sehingga penting untuk mencapai keselarasan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu, perusahaan perlu menyampaikan informasi terkait upaya mitigasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan emisi karbon (Nilasakti & Setiawan, 2024). Menurut Pelawi (2024), salah satu wujud kepedulian perusahaan adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Sebagai salah satu pihak yang menghasilkan limbah dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, perusahaan perlu menyadari bahwa kegiatan mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Piere et al. (2023), sektor perbankan adalah salah satu industri yang paling diatur oleh pemerintah karena perannya yang krusial dalam perekonomian negara, terutama sebagai penghubung dalam pembiayaan sektor riil. Sektor perbankan merupakan bagian dari sektor keuangan yang mencakup berbagai lembaga, kegiatan usaha, serta metode dan proses yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di negara-negara ASEAN-5 terdapat 92 perusahaan perbankan yang terdaftar. Berikut adalah daftar jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di masing-masing negara:

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Perbankan *go-public* di negara ASEAN-5 (2023)

No	Negara	Jumlah Perusahaan
1.	Indonesia	48
2.	Thailand	11
3.	Malaysia	11
4.	Filipina	17
5.	Singapura	5
Total		92

(Sumber: www.revinitif.com, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Indonesia memiliki jumlah perusahaan perbankan terbanyak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-5 lainnya. Sementara itu, negara yang memiliki jumlah perusahaan perbankan paling sedikit adalah Singapura. Perbankan dan lingkungan merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap keberlanjutan. Dibandingkan dengan sektor lain, industri perbankan merupakan sektor yang memiliki tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang relatif rendah serta tidak memberikan dampak langsung terhadap lingkungan. Namun, sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung praktik keberlanjutan, karena berfungsi sebagai perantara dalam pembiayaan kegiatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dengan demikian, sektor ini turut bertanggung jawab dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui kebijakan pembiayaan yang mendukung pembangunan ramah lingkungan.

Green banking adalah pendekatan bisnis yang menitikberatkan pada upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan melalui penerapan praktik operasional yang ramah lingkungan (Asyura & Syahputri, 2023). Pendekatan ini diharapkan menjadi strategi bisnis jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan dan kelestarian lingkungan dalam masyarakat. *Green banking* berorientasi pada transformasi menuju perbankan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Investasi merupakan suatu proses penempatan sumber daya, baik dalam bentuk dana, waktu, maupun tenaga, ke dalam asset atau proyek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh imbal hasil atau keuntungan ekonomi di masa yang akan

dating (Dwi, 2023). *Green investment* menjadi solusi alternatif bagi bank untuk memperoleh dukungan permodalan dalam mewujudkan praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Anisah, 2020). *Green investment* menurut Chandra & Sumani (2023), memberikan dampak perusahaan kendali dalam melestarikan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan. Adapun hal tersebut menjadi urgensi dilakukan penelitian terkait pengungkapan emisi carbon atau *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019-2023 sebagai objek penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perubahan iklim kini telah menjadi isu global yang semakin mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan berbagai perusahaan. Regulasi global dapat menjadi solusi untuk mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan mendorong setiap perusahaan untuk secara transparan mengungkapkan emisi karbon mereka (Nasih et al., 2024). Pengungkapan emisi karbon adalah langkah nyata untuk mendorong kemajuan ekonomi rendah karbon, yang bertujuan untuk mengubah arah pembangunan ekonomi agar dapat mencapai tujuan keberlanjutan (Warokka et al., 2024). Sebagai wilayah yang paling rentan terhadap bencana alam dan risiko terkait perubahan iklim, ASEAN perlu memperkuat kolaborasi untuk bersiap dan bergerak maju menuju tujuan bersama dalam transisi menuju ekonomi hijau (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Menurut laporan *National Climate Change Secretariat* (2019), negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) termasuk salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Negara-negara berkembang di Kawasan ini, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina merupakan penghasil emisi yang signifikan dan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat emisi tersebut. Seiring dengan meningkatnya emisi karbon di negara-negara ASEAN, berbagai sektor bisnis secara aktif melaksanakan strategi untuk mengurangi emisi, salah satunya adalah sektor perbankan. Secara khusus sektor perbankan memiliki

peran penting dalam upaya ini, mengingat keterkaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam inisiatif pengurangan emisi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sektor perbankan mendorong peningkatan pembiayaan hijau dan proyek-proyek berkelanjutan.

Respon komunitas internasional terhadap isu perubahan iklim diwujudkan melalui berbagai kesepakatan global, termasuk penandatanganan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Kesepakatan ini diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang pengesahan UNFCCC. Selanjutnya, komitmen ini diperkuat dengan pengesahan *Paris Agreement* melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan *Kyoto Protocol* melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang pengesahan *Kyoto Protocol to the Convention on Climate Change*. Protokol Kyoto sendiri merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota UNFCCC untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂) serta gas rumah kaca lainnya sebagai langkah mitigasi perubahan iklim.

Malaysia menargetkan emisi gas rumah kaca (GRK) nol bersih pada tahun 2050 dan menetapkan pengurangan intensitas karbon sebesar 45% terhadap PDB pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2005 (Ibrahim et al., 2024). Untuk mewujudkannya, pemerintah tengah menyusun *Long-Term Low Emissions Development Strategy* (LT-LEDS) yang berfokus pada kebijakan pengurangan emisi, transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menurut Ibrahim et al. (2024), pelaporan emisi karbon di perusahaan Malaysia masih dalam tahap berkembang. Masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan sistem akuntansi untuk emisi karbon. Selain itu, informasi per lingkup yang merinci unit bisnis, fasilitas, sumber, atau aktivitas, serta data emisi global juga jarang disajikan.

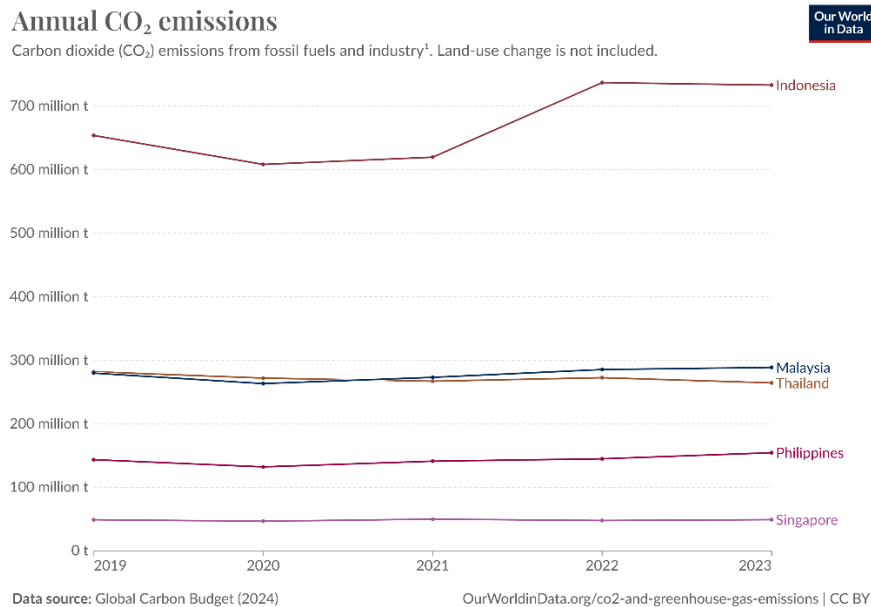
Thailand telah menjalankan berbagai inisiatif untuk menekan emisi, khususnya melalui proyek-proyek di bidang transportasi dan perubahan iklim yang dibagi dalam dua tahap (Ahmad et al., 2021). Tahap pertama berlangsung pada 2012–2015 dan tahap kedua pada 2016–2018. Proyek ini mendukung pengembangan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) Thailand untuk sektor transportasi. Di sisi lain, Pemerintah Filipina memulai strategi mitigasi

sebagai bagian dari kontribusinya terhadap upaya global dalam menurunkan emisi, dengan mengadopsi langkah-langkah hemat biaya untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Upaya tersebut mencakup peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengembangan serta optimalisasi penggunaan teknologi energi rendah karbon dan terbarukan yang sesuai, hingga pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (NFSCC, 2010). Pada tahun 2019, Singapura memberlakukan pajak karbon bagi pelaku usaha guna mendorong penurunan emisi, di mana pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi serta mendorong perubahan intensitas emisi agregat dari waktu ke waktu menjadi krusial, mengingat statusnya sebagai *city state* (Su & Ang, 2020).

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang bertujuan mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 tujuan dan 196 target pada tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan, sebagai paradigma baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, telah mendapatkan perhatian luas dan komitmen dari berbagai lembaga serta negara (Hayati & Yulianto, 2020). Salah satu tujuan utama SDGs adalah menghadapi tantangan perubahan iklim. Pengungkapan isu perubahan iklim dalam laporan keuangan tidak hanya menjelaskan potensi dampak perubahan iklim terhadap operasi dan kondisi keuangan perusahaan di masa depan, tetapi juga mengukur secara kuantitatif dampak tersebut terhadap aktivitas operasional perusahaan (Mahardika, 2022).

Emisi karbon diakui sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Hingga saat ini, hampir semua negara di Asia Tenggara telah mengumumkan komitmen untuk mencapai *net zero emission*, yang mencakup sekitar 91 persen dari emisi karbon di kawasan ini (Giwangkara & Dolan, 2021). Dalam konteks ini, kegiatan operasional perusahaan juga berperan penting, karena menghasilkan berbagai jenis gas, seperti karbon dioksida (CO₂), nitrogen monoksida (NO), belerang dioksida (SO₂), metana (CH₄), nitrogen dioksida (NO₂), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas ini terutama CO₂ dan gas rumah kaca lainnya, akan terus menumpuk di atmosfer seiring waktu. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Menurut *Center for*

International Forestry Research (CIFOR), pemanasan global terjadi akibat terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari yang berupa gelombang panas, yang kemudian dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca.



Gambar 1.2 Emisi CO₂ Tahunan di Negara ASEAN-5 periode 2019-2023
(Sumber: ourworldindata.org , 2024)

Emisi CO₂ per kapita mengukur rata-rata emisi tahunan yang dihasilkan setiap individu di suatu negara atau wilayah. Penghitungan ini dilakukan dengan membagi total emisi tahunan negara atau wilayah tersebut dengan jumlah total penduduknya (Ritchie, 2022). Gambar diatas menyajikan data emisi CO₂ di negara-negara ASEAN-5 pada periode 2019-2023. Berdasarkan gambar 1.2, Indonesia secara konsisten menjadi negara dengan emisi CO₂ tertinggi dibandingkan empat negara lainnya. Sebaliknya, Singapura berada di posisi terakhir sebagai negara dengan tingkat emisi CO₂ paling rendah. Informasi terkait emisi CO₂ biasanya disampaikan oleh perusahaan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan dokumen yang diterbitkan perusahaan secara berkala (tahunan) untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan tanggung jawab perusahaan serta dampak yang ditimbulkannya. Pelaporan ini juga menuntut transparansi dan kualitas tinggi dalam penyajian informasi keuangan guna memastikan keamanan investasi (Cahyaningsih &

Lestari, 2021). Lingkungan menjadi salah satu aspek utama dalam standar GRI. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi internasional yang mendukung bisnis, pemerintah, dan organisasi lain dalam memahami serta mengelola dampak aktivitas bisnis terhadap isu-isu keberlanjutan. GRI menyediakan panduan bagi perusahaan dalam Menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Standar GRI ini diakui sebagai praktik terbaik global untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara transparan kepada publik (GRI, 2024).

Pengungkapan emisi karbon dinilai mampu mendukung terciptanya keberlanjutan (*sustainability*) bagi perusahaan. Keberlanjutan ini merupakan penerapan dari konsep *triple bottom line*, yang pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. Konsep ini mencakup tiga elemen utama, yaitu *planet* (lingkungan), *profit* (keuntungan), dan *people* (masyarakat). Pada prinsipnya, tujuan perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak positif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan tiga elemen ini, perusahaan dapat membangun dasar yang kuat untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Dilansir dari laporan BATS News (2023), diskusi global mengenai perhitungan emisi karbon dalam sektor perbankan masih menghadapi berbagai perbedaan pandangan. Perdebatan ini berfokus pada apakah emisi dari aktivitas pasar modal, seperti penjualan saham dan obligasi, harus sepenuhnya dimasukkan dalam perhitungan jejak karbon bank. Banyak bank mengusulkan untuk hanya mencatat 33% dari emisi tersebut, dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki kendali langsung atas emisi yang dihasilkan oleh investor saham dan obligasi. Pendekatan ini dianggap lebih praktis untuk menghadapi risiko penghitungan ganda dalam ekosistem keuangan, di mana investor juga memasukkan emisi tersebut dalam laporan jejak karbon mereka.

Namun, usulan tersebut memicu kritik dari kelompok aktivis lingkungan yang menilai bahwa bank seharusnya bertanggung jawab penuh atas emisi yang berasal dari seluruh kegiatan pembiayaan mereka, termasuk dari pasar modal. Aktivis menyoroti bahwa sekitar 50% pembiayaan dari bank besar di AS selama 2016-2022 dialokasikan untuk perusahaan pengguna bahan bakar fosil melalui

pasar modal. Mereka menganggap pembobotan emisi sebesar 33% sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Hingga akhir Juli 2023, belum ada standar resmi yang diterbitkan oleh *Partnership for Carbon Accounting Financials* (PCAF), sehingga masih menjadi pertanyaan apakah bank akan diminta untuk menyelaraskan target *net zero emission* mereka antara aktivitas pasar modal dan pinjaman langsung. Dengan demikian, diperlukan pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) yang komprehensif untuk memastikan bahwa sektor perbankan bertanggung jawab atas seluruh emisi yang dihasilkan, baik dari aktivitas pasar modal maupun pinjaman langsung. Pengungkapan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mendorong bank untuk mengambil peran aktif dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan mencapai target *net zero emission* secara lebih kredibel.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan. Salah satunya yaitu *institutional ownership*. Menurut Jibril (2024) *institutional ownership* merujuk pada investor yang berperan signifikan dalam mengawasi aktivitas manajemen guna memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan baik dan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, yang berfungsi sebagai alat untuk memonitor dan mengendalikan kinerja perusahaan (Haura & Yuliandhari, 2024). Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional terhadap perusahaan guna mencegah perilaku tidak etis yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ika et al. (2022), Solikhah et al. (2021) memberikan hasil bahwa *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Adanya *institutional ownership* diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Perusahaan dengan tingkat *institutional ownership* yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi terkait lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa *institutional ownership* mendorong penerapan operasi bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat *carbon emission disclosure* perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Simamora et al.

(2022), Suherman & Kurniawati (2023), dan A. E. Putri & Warnida (2023a) menyatakan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh pada *carbon emission disclosure*. Menurut N. Putri et al. (2022) *institutional ownership* merupakan pihak eksternal yang umumnya dianggap tidak memiliki pengaruh langsung dalam pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi *carbon emission disclosure* adalah *public ownership*. Apabila saham perusahaan dimiliki oleh publik, maka setiap tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam perusahaan harus diinformasikan secara transparan dan dapat dipahami oleh publik sebagai bagian dari pemegang saham (Khairin & Firmansyah, 2024). Pada penelitian yang dilakukan oleh Suwandi et al. (2022) memberikan hasil bahwa *public ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *carbon emission disclosure*, karena tingginya rasio *public ownership* mendorong perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan sosial. Hal ini disebabkan adanya tekanan dari para pemegang saham, yang menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan dan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi (2021) menyatakan bahwa *public ownership* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*, hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham publik kemungkinan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pengungkapan CSR. Kemungkinan kepemilikan publik pada perusahaan secara umum belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap isu lingkungan dan sosial sebagai masalah krusial yang perlu diungkapkan secara ekstensif dalam *annual report*.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi *carbon emission disclosure* adalah *managerial ownership*. Manajemen berupaya agar perusahaan dapat diterima dan hidup harmonis dengan masyarakat sehingga operasionalnya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat, seperti data mengenai emisi karbon. Pemerintah Malaysia telah menetapkan insentif dan regulasi guna mendorong perusahaan menerapkan efisiensi karbon. Sebagai respons, banyak perusahaan mulai mengadopsi praktik keberlanjutan untuk menurunkan emisi karbon. Langkah

ini dilakukan demi memenuhi regulasi serta menjawab tuntutan transparansi dari pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat reputasi perusahaan (Vaicondam et al., 2025).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budiharta (2020) memberikan hasil bahwa *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*, karena semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen, semakin besar pula tingkat pengungkapan informasi emisi karbon. Hal ini mencerminkan adanya kepedulian mendalam dari manajemen terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, pada penelitian Majid et al. (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki secara langsung oleh manajer, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon mereka.

Pada penelitian yang dilakukan oleh A. E. Putri & Warnida (2023a), Simamora et al. (2022), dan Solikhah et al. (2021) memberikan hasil bahwa *managerial ownership* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*, karena peningkatan kepemilikan manajerial tidak selalu mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Pengawasan dari pihak institusional cenderung mendorong manajemen untuk memanfaatkan dana internal dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan, daripada fokus pada pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size*. Menurut Sarwono (2022), suatu variabel yang pengaruhnya akan dihilangkan disebut variabel kontrol. *Return on asset* digunakan sebagai variabel kontrol pertama dalam penelitian ini. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik mampu medanai aktivitas pelaporan sukarela, termasuk pengungkapan emisi karbon. Tingkat ROA yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab lingkungannya. Dengan demikian perusahaan dengan ROA yang tinggi dipandang lebih berpeluang untuk mengungkapkan emisi karbon dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah (Lestari et al., 2024). Pada penelitian yang dilakukan oleh Syahdanti & Marietza (2024), dan A. E. Putri & Warnida (2023b), memberikan hasil

bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, sehingga secara finansial dinilai mampu untuk mengungkapkan emisi karbon. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih memprioritaskan upaya peningkatan laba dibandingkan melakukan pengungkapan emisi karbon (A. E. Putri & Warnida, 2023b). Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2024), memberikan hasil bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas bukan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon (Lestari et al., 2024).

Variabel kontrol kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban dan utang-utang yang dimilikinya (Syahdanti & Marietza, 2024). Apabila tingkat *leverage* perusahaan tinggi, maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan informasi sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana atau utang yang signifikan untuk meminimalkan risiko gagal bayar yang bisa membahayakan keberlanjutan operasional perusahaan (Widianto & Sari, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh A. E. Putri & Warnida (2023b), memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2024), Syahdanti & Marietza (2024), dan Widianto & Sari (2020), bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Variabel kontrol ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit firm size*. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang cukup relevan guna mendukung pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan (Arifah & Haryono, 2021). Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik bereputasi baik, memberikan keyakinan terhadap pelaksanaan audit yang transparan dan berkualitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Haryono (2021), memberikan hasil bahwa *audit firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda & Rismayani (2019), memberikan hasil bahwa *audit firm size* tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dan adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya mengenai *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* pada *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol, maka topik tersebut menarik untuk diteliti dengan judul **“Pengaruh *Institutional Ownership*, *Public Ownership*, dan *Managerial Ownership* Terhadap *Carbon Emission Disclosure* dengan *Return on Asset*, *Leverage*, dan *Audit Firm Size* Sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang *Go-Public* di Negara ASEAN-5 Periode 2019-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023. variabel independen dalam penelitian ini adalah *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *carbon emission disclosure*. selain itu, *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* digunakan sebagai variabel kontrol untuk memperkuat analisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa hasil statistik deskriptif dari *institutional ownership*, *public ownership*, *managerial ownership*, *return on asset*, *leverage*, *audit firm size*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?
2. Apakah *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?

3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?
4. Apakah *public ownership* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?
5. Apakah *managerial ownership* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?
6. Apakah *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023 sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *institutional ownership*, *public ownership*, *managerial ownership*, *return on asset*, *leverage*, *audit firm size*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership* secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *public ownership* secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *managerial ownership* secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki hasil yang dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan pihak lain, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan memberikan informasi bagi akademisi mengenai pengaruh *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan sub sektor perbankan yang *go-public* di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan memberikan informasi bagi penulis, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang dengan topik yang berkaitan.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pentingnya *carbon emission disclosure* untuk mengoptimalisasikan *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership*.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan kesadaran akan pertanggungjawaban perusahaan terhadap *carbon emission disclosure*, sehingga menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir yang terdiri dari Bab I sampai Bab V:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas isi penelitian. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sub sektor perbankan di negara ASEAN-5 periode 2019-2023, latar belakang penelitian terkait topik *carbon emission disclosure* disertai fenomena dan penelitian terdahulu, perumusan masalah serta tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* baik parsial maupun simultan terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol. Adapun bab ini berisikan latar belakang penelitian hingga sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan yang ringkas dan jelas mengenai teori umum dan khusus, disertai penelitian terdahulu sebagai landasan untuk menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan, metode penelitian yaitu kuantitatif, operasionalisasi variabel, penentuan populasi serta pemilihan sampel berdasarkan teknik *purposive*

sampling, jenis sumber data, hingga metode analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan karakteristik data observasi yakni perusahaan sub sektor perbankan di negara ASEAN-5 periode 2019 – 2023, memberikan hasil dari analisis data yang telah diolah serta memberikan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengaruh *institutional ownership*, *public ownership*, dan *managerial ownership* terhadap *carbon emission disclosure* dengan *return on asset*, *leverage*, dan *audit firm size* sebagai variabel kontrol, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya.